

**EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

OLEH :

TIKA ELISA
NIM: 1805906030080



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2023**

**EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH :

TIKA ELISA
NIM: 1805906030080



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2023**



Meulaboh, 3 Juli 2023

Program Studi : Ekonomi Akuntansi
Jenjang : S1 (Strata 1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : **TIKA ELISA**
NIM : **1805906030080**

Dengan judul : **Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Lilis Marlina, S.E., M.Si.Ak
NIP. 198509222019032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Sekretaris Jurusan Akuntansi



Dr. Hamdi Harmen, S.E., M.M
NIP. 196911082002121001

Sari Maulida Vonna, S.E., M.Si.Ak
NIP. 198910052019032037



Meulaboh, 3 Juli 2023

Program Studi : Ekonomi Akuntansi
Jenjang : S1 (Strata 1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : **TIKA ELISA**
NIM : **1805906030080**

Dengan judul : **Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada tanggal 5 Juni 2023.

Menyetujui
Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Lilis Marlina, S.E., M.Si
2. Sekretaris : Ika Rahmadani, S.E., M.Si.Ak
3. Anggota : Cut Sri Firman Hastuti, S.E., M.Si.Ak

Mengetahui:
Sekretaris Jurusan Akuntansi



Sari Maulida Vonna, S.E., M.Si.Ak
NIP. 198910052019032037

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tika Elisa**

Nim : 1805906030080

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak mendapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Meulaboh, 19 Juni 2023
Yang Menyatakan



Tika Elisa
NIM: 1805906030080



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha
Mulia, Yang mengajar manusia dengan pena,
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)*

*Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih,
bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku,
yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu,
Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai
Di penghujung awal perjuanganku
Segala Puji bagi Mu ya Allah.*

*Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silah ku merintih, menadahkan doa
dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah
karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya
selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta
pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan
yang ada didepanku., Ayah... Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku
untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas
mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa
hingga segalanya.. Ya Allah berikanlah balasan syurga firdaus untuk mereka dan
jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu....aamiin.*

*Kupersembahkan karya sederhana kepada orang yang terkasih dan kusayangi
kehadapan tercinta Ayahanda "**Alm Harsoyo**", Ibunda "**Surati**", terimakasih yang selalu
memberi semangat dan do'a dalam menyelesaikan studi sarjanaku...*

*Terima kasih selanjutnya untuk Abang-abangku "**Anto, Dani, Aan, dan Tono**" dan
juga Mbakku "**Wiki**" serta Adikku tercinta "**Dela**", yang luar biasa dalam memberi
dukungan dan mendo'akanku dalam menggapai tujuan seperti yang diharapkan.
Terimakasih yang tak terhingga, kepada pembimbing Ibu **Lilis Marlina, S.E. M.Si** yang
selama ini telah memberikan pengarahan, saran dan masukan untukku dalam pembuatan
karya skripsi ini. Serta dosen penguji ibu **Ika Rahmadani, S.E., M.Si. Ak** dan Ibu **Cut Sri
Firman Hastuti, S.E., M.Si., Ak**, yang telah meluangkan waktu untuk menguji karya
skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan menuntunku menjadi manusia yang
berharga didunia dan di akhirat.*

*Spesial Buat Seseorang... yang masih menjadi rahasia Ilahi, Terimakasih atas
perhatian dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam
menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan massa
depanku.terimakasih untuk motivasi dan semangatnya...*

*Terimakasih untuk Teman-teman Prodi Akuntansi Angkatan 2018 Fakultas
Ekonomi-UTU Meulaboh, serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian
Tugas Akhir ini... yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terimakasih buat masukan
dan dukungannya selama ini.*

By. TIKALISA, S.E

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya**”.

Penyusunan proposal skripsi ini dilakukan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Teuku Umar Meulaboh. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan rasa hormat disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si., selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
2. Bapak Dr. Hamdi Harmen, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
3. Ibu Sari Maulida Vonna S.E.,M.Si.Ak., Selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
4. Ibu Lilis Marlina, S.E. M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Para Dosen dan Staf akademik Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
6. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda, serta keluarga tercinta yang

telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang tiada batas dan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.

7. Sahabat-sahabat di Jurusan Ekonomi Akuntansi Manajemen, Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi yang selalu bersama di saat kuliah dan teman-teman yang telah banyak membantu proposal skripsi yang sederhana ini tetapi mempunyai manfaat.

Penulis menyadari dalam penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan proposal skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa membalas semua kebaikan kita semua, *Aamiin Ya Rabbal' Alamin*.

Alue Peunyareng, 26 Juni 2023

Penulis

Tika Elisa

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas Teuku Umar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tika Elisa**
NIM : 1805906030080
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Teuku Umar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Teuku Umar berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Meulaboh, 16 Juni 2023

Yang menyatakan



Tika Elisa
NIM. 1805906030080

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan dengan adanya pengawasan dan motivasi dari atasan laporan keuangan yang disusun memperoleh hasil yang lebih baik, dengan adanya sistem pengendalian intern yang mengawasi dan mengarahkan dari pihak *principal* dan *agent* sehingga dapat memberikan informasi yang sebenarnya untuk disampaikan dalam penyusunan laporan keuangan, perlu adanya motivasi kerja dalam pembuatan laporan keuangan sehingga pemerintah daerah dapat menyelesaikan laporan keuangan tepat pada waktunya dan dapat menyampaikan informasi yang sebenarnya bagi para penggunanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan informan 3 orang pegawai keuangan dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual khususnya di Badan Pengelolaan BPKD Kabupaten Nagan Raya telah melakukan penerapan akuntansi berbasis akrual secara akurat dan jelas, sehingga akuntansi berbasis akrual tersebut dapat memberikan informasi keuangan yang lebih baik untuk dasar akuntabilitas Pemerintah. Informasi yang ada pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya antara lain, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Kendala yang dihadapi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah adalah berasal kualitas Sumber daya manusia yang dibutuhkan, masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami akuntansi berbasis akrual, ini lebih disebabkan sering terjadinya pergantian (*rolling*) pegawai terutama untuk staf akuntansi di setiap BPKD Kabupaten Nagan Raya.

Kata Kunci: Evaluasi, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Laporan Keuangan

ABSTRACT

This study aims to describe the evaluation of the application of accrual-based government accounting standards in the preparation of financial reports in the Nagan Raya Regency government. Accrual-based accounting in preparing financial reports with supervision and motivation from supervisors prepared financial reports to obtain better results, with an internal control system that supervises and directs the principal and agent so that they can provide actual information to be conveyed in the preparation of financial reports, it is necessary to have work motivation in preparing financial reports so that local governments can complete financial reports on time and can convey real information to their users. The method used in this study is a qualitative method. This study used 3 financial employees as informants from the Regional Financial Management Agency (BPKD) Office of Nagan Raya Regency. The data analysis method used is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that the application of accrual-based accounting, especially in the Nagan Raya Regency BPKD Management Board, has implemented accrual-based accounting accurately and clearly, so that accrual-based accounting can provide better financial information for the basis of Government accountability. The information contained in the financial reports of the Nagan Raya Regency Government includes reports on budget realization, reports on changes in excess balances, balance sheets, operational reports, cash flow reports, reports on changes in equity, and notes on financial statements. The obstacles faced in presenting government financial reports stem from the quality of the human resources needed, the lack of human resources who understand accrual-based accounting, this is more due to the frequent occurrence of employee turnover, especially for accounting staff in each BPKD of Nagan Raya Regency.

Keywords : *Evaluation, Accrual Based Government Accounting Standards, Financial Reports*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN KOMISI UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Konsep Evaluasi	10
2.2 Laporan Keuangan.....	11
2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan.....	11
2.2.2 Jenis Jenis Laporan Keuangan.....	12
2.2.3 Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan.....	14
2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.....	17
2.3.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrua	17
2.3.2 Keunggulan dan Kelamahan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua	18
2.3.3 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua	20
2.3.4 Sistem Pencatatan Akuntansi Pemerintahan	20
2.3.5 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan	21
2.4 Perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan diIndonesia .	23
2.4.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.....	25
2.4.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	26
2.5 Kajian Pustaka	30
2.6 Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Desain Penelitian	36

3.1.1	Jenis Investigasi.....	36
3.1.2	Setting Penelitian.....	37
3.1.3	Tingkat Keterlibatan Peneliti.....	37
3.1.4	Unit Analisis.....	37
3.2	Objek Penelitian.....	37
3.3	Sumber dan Jenis Data.....	38
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	38
3.5	Analisis Data Sumber data.....	39
3.6	Pengujian Keabsahan Data.....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
4.1.1	Kondisi Geografis.....	42
4.1.2	Kondisi Demografis.....	44
4.2	Hasil Penelitian.....	45
4.2.1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.....	46
4.2.2	Informasi yang Diungkapkan Dalam Laporan Keuangan.....	49
4.2.3	Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.....	54
4.2	Pembahasan.....	57
BAB V	PENUTUP.....	61
5.1	Kesimpulan.....	61
5.2	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....		63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022.....	44
Tabel 4.3	Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1 Peta wilayah administrasi Kabupaten Nagan Raya.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi Penelitian.....	65
Lampiran 2	Pedoman Wawancara	67
Lampiran 3	Lembar Observasi.....	68
Lampiran 4	Contoh Laporan Keuangan di BPKD Kabupaten Nagan Raya	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan dalam sektor publik di Indonesia dewasa ini harus memenuhi tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2016). Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*).

Stakeholder (pengguna kepentingan) membutuhkan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan. Pengelolaan tersebut harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku. Kepatuhan terhadap prosedur, peraturan dan prinsip akan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku umum.

Penerapan pencatatan pada pemerintahan sebelum adanya reformasi di bidang Keuangan Negara adalah dengan penerapan sistem pencatatan *single entry*. Pada sistem pencatatan ini, pencatatan transaksi dilakukan dengan mencatat satu

kali, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya kas dicatat di sisi penerimaan dan transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas dicatat di sisi pengeluaran. Hasilnya pemerintah tidak memiliki catatan tentang piutang, utang, apalagi tentang aset tetap dan ekuitas (Setiyanti, 2016).

Pada tahun 2010 pemerintah telah mengganti PP No. 24 tahun 2005 menjadi Peraturan namun demikian, dalam ketentuan tersebut diberikan aturan fleksibilitas dalam masa transisi yang mengatur bahwa selama basis akrual belum dapat dilaksanakan maka dapat digunakan basis kas untuk pendapatan dan belanja. Dalam prosesnya, Pemerintah Indonesia tidak serta-merta dapat langsung melakukan peralihan dari sistem akuntansi berbasis kas ke sistem akuntansi berbasis akrual, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual

Reformasi keuangan di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya paket Undang-Undang di bidang keuangan negara pada tahun 2003 dan 2004 mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), serta penerapan *international best practices* yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 ayat (1) dan UU Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 70 ayat (2) mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun dan menyajikan laporan pendapatan dan belanja negara selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008. Sejak

terbitnya paket UU di bidang Keuangan Negara, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual di Indonesia.

Hasil studi yang dilakukan oleh IFAC *Public Sector Committee* (dalam Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2019) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Menurut Najati (2016) Keputusan untuk menerapkan SAP berbasis akrual dapat menimbulkan permasalahan yang serius. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual karena ada beberapa hal yang dapat menjadi hambatan atau kendala. Kompleksitas akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu hal yang dapat menjadi hambatan dan menjadi salah satu alasan timbulnya penolakan terhadap perubahan basis akuntansi. Hal yang sama juga terjadi pada saat perubahan dari akuntansi berbasis kas menuju akrual pada tahun 2005 lalu. Diperlukan waktu bertahun-tahun bagi instansi pemerintah pusat untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Hal ini dibuktikan oleh negara-negara yang telah terlebih dahulu menerapkan SAP akrual seperti Portugal dan New Zealand. Selama 15 tahun, terjadi ketidakseragaman dalam penerapan SAP akrual di Portugal. Laporan Keuangan New Zealand yang pertama disusun

dengan SAP akrual dianggap belum memenuhi standar, Selain itu sebagai negara berkembang Indonesia lebih rentan terhadap permasalahan jika dibandingkan dengan negara maju (Leksono, 2017).

Sejumlah pemerintah (jurisdiksi) yang menggunakan sistem ganda (*dual system*) tersebut menemukan rintangan berupa resistensi penerimaan akuntansi berbasis akrual. Di samping itu, dengan sistem ganda diperlukan rekonsiliasi yang ekstensif diantara dua sistem tersebut. Keberhasilan akuntansi akrual, sebagian tergantung dari insentif yang diberikan pada para manajer. Apabila para manajer tetap diminta bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran secara basis kas, maka fokus mereka (dan fokus para politisi) akan terus tertuju pada sumber daya kas, misalnya, pada biaya dari informasi akrual yang baru. Apabila basis akrual mau diterapkan juga untuk penganggaran, biasanya butuh waktu satu atau dua periode setelah pelaporan keuangan berbasis akrual diterapkan. Hal ini untuk meyakinkan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan dari akuntansi akrual adalah akurat dan andal (study no 14, IFAC-PSC, 2003).

Sementara didalam negeri terdapat beberapa permasalahan terkait penerapan akuntansi akrual pada pemerintah seperti yang terdapat dalam Penelitian Surepno (2015), hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pada penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemkab Semarang masih menemui hambatan dalam penerapannya, yaitu masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), dukungan teknologi informasi belum memadai, permasalahan aset tetap dan belum adanya petunjuk teknis bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Demikian juga pada penelitian Widianti, et al. (2016) menemukan permasalahan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Tegal, bahwa tingkat pendidikan staf,

pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi dan pengalaman berpengaruh secara simultan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual.

Di Provinsi Aceh sendiri penerapan akuntansi berbasis akrual masih banyak mengalami kendala. Pada penelitian Syarienda (2018) menyatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di Aceh Tengah terkendala pendanaan karena dalam pelaksanaan akrual membutuhkan dana yang besar dan mencukupi tidak hanya untuk investasi awal tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pemeliharaan. Hal ini disebabkan penerapan basis akrual membutuhkan pembaruan yang terus menerus sehingga tersedianya dana pemeliharaan pun menjadi mutlak.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu instansi pemerintah dimana membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan telah menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyajian laporannya, atas realisasi anggaran dimana laporan tersebut telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (monev.anggaran.depkeu.go.id).

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sendiri telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh, Pemet Aryo Wibowo, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSFA menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPD ini merupakan tugas dari konstitusional BPK sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, sesuai dengan pasal 17 UU No.15 tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas LK tersebut

kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Disisi lain Pemut Aryo Wibowo juga menjelaskan pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan supaya tidak adanya kecurangan lainnya. "Oleh karena itu, dalam melakukan pemeriksaan keuangan selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil penilaian terhadap SP1 dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan,". Menurut pemut Aryo Wibowo, masih ada beberapa penyesuaian pendapatan yang belum menyesuaikan dengan kemampuan daerah, pengumuman PAD yang belum optimal, kelemahan dalam penuntasan belanja pegawai, penentuan honorarium belum mempedomani aturan yang berlaku, kekurangan volume dalam belanja modal pengelolaan dan pencatatan aset daerah. Diakhir pidatonya, Kepala BPK mengingatkan kepada pimpinan DPRK dan kepala daerah untuk menindak lanjuti rekomendasi atas hasil dan pemeriksaan supaya dapat disampaikan kepada BPK selambat lambatnya setelah 60 hari LPH diterima sesuai UU nomor 15 tahun 2004 pasal 20 tentang pemeriksaan dan pengelolaan keuangan Negara (naganraya.kab.go.id)

Berdasarkan hasil wawancara pada survey awal dengan Wakil Kepala Bidang Akuntansi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya menyatakan bahwa untuk penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini memang memakan waktu yang lama, hal itu di karena kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam melakukan penyesuaian dengan cepat, sehingga masih banyak sumber daya

manusia yang harus diberikan pelatihan atau sekolah singkat. Implementasi ini telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dan untuk teknologi sendiri badan pengelolaan keuangan daerah menggunakan dua sistem yaitu sistem manual yang di kerjakan langsung dengan pegawai dan juga dengan sistem SIA atau yang sering disebut dengan sistem informasi akuntansi yang di kerjakan menggunakan teknologi yang mendukung.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemkab Nagan Raya sudah melakukan penyusunan laporan keuangan dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Selain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan, maka terdapat tiga laporan tambahan akibat dari pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas yang sudah diaudit oleh BPK RI. Akibat dari belum sempurnanya laporan saldo anggaran lebih, maka sering terjadi kasus-kasus yang menyimpang seperti kelebihan pembayaran anggaran dari rencana anggaran awal. Kasus-kasus seperti itu dapat merugikan pemerintah dalam hal ini erat hubungannya dengan fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan menjadi salah satu masalah penting bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya program kerja pemerintah secara akuntabel. Meningkatnya kegiatan pengelolaan keuangan daerah dengan nilai anggaran yang lebih besar dan terperinci ke berbagai program kerja yang membuat fungsi pengawasan menjadi semakin penting untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan serta mengarahkan penggunaan anggaran yang lebih optimal

pada program kerja yang berkualitas. Melalui pengawasan kita dapat mengetahui apakah instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta telah menggunakan anggaran publik secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penelitian merupakan replikasi dari Syarienda dkk (2018) yang membahas tentang langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah penerapan akuntansi berbasis akrual dengan mengambil studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Dan penelitian dari hari habullah (2017) dimana peneliti ini membahas tentang Implementasi Dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang diberi judul “**Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah yang penulis angkat adalah Bagaimana Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lainnya dan dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi yang relevan dengan penelitian ini.
 - b. Hasil penelitian diharapkan berguna dalam pengembangan teori akuntansi di *sector public*.
2. Manfaat Praktis
 - a) Sebagai bahan informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan pengembangan dan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
 - b) Sebagai bahan informasi bagi pegawai sub bagian keuangan yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Evaluasi

Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2020 :3), (Laksono,2017 :2) menyatakan evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur tertentu untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan terencana untuk menilai suatu permasalahan yang terjadi dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dapat dibandingkan dengan tolok ukur guna memperoleh kesimpulan dan solusi atas permasalahan yang dinilai.

Evaluasi secara umum memiliki tujuan meningkatkan kualitas program, melakukan penilaian, memberikan kepuasan pada kinerja serta menganalisa setiap hasil yang sudah direncanakan. Menurut (Laksono,2017 :2) , tujuan dari evaluasi adalah:

- a) Mengetahui apakah tujuan yang telah direncanakan sudah tercapai
- b) Memeberikan objektivitas pengamatan terhadap hasil kinerja
- c) Untuk mengetahui kemampuan dan memastikan kelakyakan
- d) Untuk mendapatkan umpan feedback dari kegiatan yang telah dilakukan

2.1 Laporan Keuangan

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Subramanyam dalam Kaloh at.al (2018) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis. Analisis bisnis merupakan evaluasi atas prospek dan risiko perusahaan untuk pengambilan keputusan bisnis. Laporan keuangan adalah suatu laporan (*financial statement*) akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan, apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang.

Menurut pradono dkk (2015) laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya

Menurut Hidayat (2018: 15) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Posisi keuangan

perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi perubahan lingkungan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK 107 (Revisi 2020), tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan kinerja keuangan dan juga arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi”.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Laporan keuangan (financial statement) adalah laporan yang dibuat pada akhir periode akuntansi

2.2.2 Jenis Jenis Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan, pemerintah memiliki beberapa komponen pelaporan keuangan yang terdiri dari 3 komponen utama yaitu laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan CALK (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2016).

Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari 2 hal pelaporan, yaitu LRA dan Laporan Perubahan SAL. Kemudian laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. Sedangkan CALK sendiri adalah sebuah laporan yang menjelaskan rincian tentang laporan pelaksanaan anggaran. CALK juga merupakan sebuah laporan yang tidak bisa dipisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2016).

Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Realisasi Anggaran menjelaskan tentang alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang sedang dikelola pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, merupakan data yang mencatat kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih pada tahun pelaporan anggaran.

- c) Neraca;

Laporan Neraca menginformasikan tentang posisi keuangan dari kelompok pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang ada di dalam laporan neraca ini adalah aset, kewajiban, dan ekuitas.

- d) Laporan Operasional (LO);

Laporan Operasional berisikan data sumber daya ekonomi yang menjelaskan penggunaan modal yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan pemerintahan untuk satu periode pelaporan.

- e) Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Arus Kas berisikan mengenai informasi kas yang berhubungan dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas memberikan gambaran tentang saldo awal,

penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi mengenai catatan kenaikan dan penurunan ekuitas pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Catatan atas Laporan Keuangan terdiri dari penjelasan dan rincian dari angka yang tertera dalam sebuah laporan keuangan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

Catatan atas Laporan Keuangan juga terdiri dari sebuah informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh pihak pelaporan dan informasi lain yang harus dipaparkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, Catatan atas Laporan Keuangan juga berisi tentang berbagai data yang diperlukan untuk membuat penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.2.3 Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan

Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional

pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Anggota ikatan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Kerangka Konseptual - Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

(e) Evaluasi

Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menyatakan Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

2.3.1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual

Menurut Peraturan Menteri dalam Negri nomor 64 tahun 2013 Pengertian Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Basis Akrual (*Accrual Basis*) adalah teknik pencatatan transaksi yang memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat, karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, liabilitas/kewajiban dan aset neto. Basis akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Yusuf,2017:2) Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Jadi accrual basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Akuntansi pemerintah di Indonesia dilandasi dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), yang disertai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), buletin teknis (bultek) dan jika memungkinkan disertai juga interpretasinya. SAP dikukuhkan dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (Yusuf,2017:2)

Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. yaitu pelayanan publik serta nomor rekening perkiraan yang digunakan. (Yusuf,2017:2)

2.3.2 Keunggulan dan Kelamahan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual

Keunggulan metode pencatatan akuntansi secara Accrual Basis adalah. (Yusuf,2017:2):

- a. Metode accrual basis digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.

- b. Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya.
- c. Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima.
- d. Banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar (sesuai dengan Ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan untuk menggunakan basis akrual).
- e. Piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung kedalam estimasi piutang tak tertagih.
- f. Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.
- g. Adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan.
- h. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan kedepannya.
- i. Adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian

Sedangkan kelemahan pencatatan akuntansi secara accrual basis adalah sebagai berikut (Yusuf, 2017):

1. Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
2. Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan perusahaan.

3. Dengan adanya pembentukan cadangan akan dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
4. Perusahaan tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima.

2.3.3 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua

Menurut Yusuf (dalam Ridwan, 2019) Tujuan dari penggunaan basis akrual adalah

- (a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan);
- (b) Meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen asset;
- (c) Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah;
- (d) Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan;
- (e) Mereformasi sistem anggaran belanja;
- (f) Transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.3.4 Sistem Pencatatan Akuntansi Pemerintahan

Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) terdapat tiga macam sistem pencatatan yang digunakan, yaitu:

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan single entry sering juga disebut dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan

transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

2. *Double Entry*

Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Sisi debit ada di sebelah kiri sedangkan sisi kredit ada di sebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *single entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Sistem pencatatan *double entry* diterapkan untuk mencatat transaksi yang ditujukan untuk menyusun neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas (pelaporan finansial), sedangkan transaksi yang bertujuan untuk menyusun LRA dan laporan perubahan SAL (pelaporan pelaksana anggaran) dicatat di dalam buku anggaran.

2.3.5 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah untuk menyediakan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang lengkap, cermat, akurat dan transparan sehingga

dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sesuai kebutuhan para pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut Stakeholders yang meliputi (Kemenkeu, 2020 : 20) :

a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah.

b. BPK (Badan Pengawas Keuangan)

Adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang termasuk dalam badan ini adalah: Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

c. Investor, Kreditor, dan Donatur Badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi Pemerintah Daerah

d. Analisis ekonomi dan pemerhati Pemerintah Daerah Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti: Lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi termasuk akademisnya), ilmuan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain-lain.

e. Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan Pemerintah Daerah atau yang menerima produk atau jasa dari Pemerintah Daerah.

f. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat memerlukan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah (Pasal 2 PP No. 108/2000).

g. Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, dan Provinsi)

Pemerintah Daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman

2.4 Perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan diIndonesia

Pelaksanaan keuangan negara sebelum tahun 1975 belum menggunakan sistem akuntansi. Pada tahun 1980, Departemen Keuangan mulai membuat rencana studi modernisasi sistem akuntansi pemerintah. Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA), yang menjadi pedoman pencatatan keuangan daerah yang pada dasarnya sebatas tata buku bukan merupakan suatu sistem akuntansi. Pada era transisi otonomi, dikeluarkanlah Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang mulai mengenalkan penggunaan akuntansi basis kas modifikasian (*modified cash basis*) serta pembukuan berpasangan (*double entry book keeping*) untuk pencatatan keuangan pemerintah (Biro Analisa Anggaran DPR RI, 2018)

Perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia dimulai pada saat disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 ayat (1) dan UU Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 70 ayat (2) mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun dan menyajikan laporan pendapatan dan belanja negara selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008. Sejak terbitnya paket UU di bidang Keuangan Negara, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual di Indonesia. Reformasi akuntansi pemerintahan merupakan proses perubahan dari sistem akuntansi pemerintahan secara tradisional ke sistem akuntansi secara modern. Sistem akuntansi secara tradisional menganut basis akuntansi kas dengan sistem pencatatan *single entry*. Sedangkan sistem akuntansi modern menganut basis akrual dengan sistem pencatatan double entry (Biro Analisa Anggaran DPR RI, 2018)

Pada Tahun 2005, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut memberlakukan SAP berbasis akrual baik untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas paling lambat Tahun 2015. Pemerintah pusat telah menyusun langkah strategis untuk melaksanakan basis akrual tersebut (Biro Analisa Anggaran DPR RI, 2018)

Sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP bahwa Pemerintah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangannya di tahun 2015 yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual. Hal ini pernah terjadi di tahun 2008 lalu seiring diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan dimana penyusunan laporan keuangan di pemerintahan Indonesia berubah dari awalnya menggunakan basis kas menjadi basis kas menuju akrual (Biro Analisa Anggaran DPR RI, 2018)

2.4.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

Akuntansi dengan basis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menurut Asfiansyah (2015) dianggap lebih baik daripada basis kas. Akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengaplikasian basis akrual pada dasarnya untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh atau terjadi, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

2.4.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Adapun mengenai karakteristik laporan keuangan sebagaimana yang di jelaskan dalam PP No. 71 Tahun 2010 Menyatakan Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan;

- 1) Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya . Informasi yang relevan: Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akandatang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- 3) Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal;

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan;

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

1) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Peraturan PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- (a) aset;
- (b) kewajiban;
- (c) ekuitas;
- (d) pendapatan-LRA;
- (e) belanja;
- (f) transfer; .
- (g) pembiayaan;
- (h) saldo anggaran lebih
- (i) pendapatan-LO;
- (j) beban; dan
- (k) arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraf , namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk Anggotakan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporanselama satu periode.

Peraturan PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan Komponen-komponen yang terdapat dalam satu aset laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*Anggaranary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Neraca;

- d) Laporan Operasional;
- e) Laporan Arus Kas;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

- (a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya

2.5 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama & Tahun	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan & Persamaan
1	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Sebagai Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang) (Yunita, 2019)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.	Penyusunan laporan keuangan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang berkaitan dengan penerapan SAIBA telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.	Perbedaan penelitian ini adalah pada metode kualitatif yang digunakan dan metode yang peneliti gunakan kualitatif interpretatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas topik yang sama yaitu tentang akuntansi berbasis akrual

Tabel 2.1 Lanjutan

2	Implementasi Dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pemerintahan (Studi Kasus Pada Bappeda Kabupaten Gowa) (Hisbullah, 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - penelitian ini kualitatif dengan menggunakan pendekatan Fenomenologi - Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. - Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelaporan dikantor badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) kabupaten gowa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. hal ini didukung dengan adanya bukti nyata bahwa bappeda kabupaten gowa telah antusias mengimplementasikan dan mengoptimalkan sistem akuntansi berbasis akrua dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan sebagaimana yang peneliti dapatkan dilapangan dan didukung rincian anggaran yang telah dimanfaatkan untuk menggunakan sistem tersebut</p>	<p>Pendekatan Penelitian ini berbasis fenomenologi sementara pendekatan penelitian penulis berdasarkan analisis evaluative. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas topik yang sama yaitu tentang akuntansi berbasis akrua</p>
3	Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah (Syarienda, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 	<p>Hasil penelitian ini menyatakan pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrua pada Pemda Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa mengadopsi sistem baru dalam sebuah entitas tidaklah mudah, diperlukan suatu proses yang harus ditempuh untuk merubah sistem yang ada dengan melakukan perubahan pada beberapa aspek. Kemudian pada pelaksanaannya ditemui permasalahan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai baik dari segi</p>	<p>Subjek penelitian ini Pada Pemda Kabupaten Aceh Tengah sementara penelitian penulis dikabupaten Nagan Raya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas topik yang sama yaitu tentang akuntansi berbasis akrua</p>

Tabel 2.1 Lanjutan

		-	pengalaman maupun dari latar belakang pendidikan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah	
4	Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dalam Perspektif Teori Institusional Studi Kasus pada Pemerintah Kota Malang (wahyuni, 2016)	- penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang mampu menjalankan proses implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua dikarenakan leading sector pengelolaan keuangan yakni BPKAD Kota Malang memiliki komitmen yang tinggi agar berhasil dalam melaksanakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua	Subjek penelitian ini Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (BPKAD) Kota Malang sementara penelitian penulis dikabupaten Nagan Raya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas topik yang sama yaitu tentang akuntansi berbasis akrua
5	Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Dollah dkk, 2017)	- penelitian adalah kualitatif deskriptif - Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan kuesioner.	Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan pada satuan kerja pemerintah daerah kabupaten bolaang sudah menggunakan basis akrua, kualitas laporan keuangan satuan kerja pemerintah daerah kabupaten bolaang sudah baik (berkualitas) dan terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi akrua terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bolaang.	Subjek penelitian ini Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang sementara penelitian penulis dikabupaten Nagan Raya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas topik yang sama yaitu tentang
6	Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	-metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor otoritas pelabuhan utama	Subjek penelitian ini Pada Kantor Otoritas Pelabuhan

Tabel 2.1 Lanjutan

	Dengan Menggunakan Aplikasi Saiba Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (Mutmainna, 2017)	-	makassar telah menerapkan dan melaksanakan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual. penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi saiba pada kantor otoritas pelabuhan utama makassar. laporan keuangan yang dihasilkan dengan basis akrual memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan, yaitu dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam capaian realisasi anggaran namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang lebih valid	Utama Makassar penelitian penulis dikabupaten Nagan Raya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas topik yang sama yaitu tentang akuntansi berbasis akrual
7.	Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dengan Menggunakan Aplikasi Saiba Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (Mutmainna, 2017)	-metode penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor otoritas pelabuhan utama makassar telah menerapkan dan melaksanakan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual. penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi saiba pada kantor otoritas pelabuhan utama makassar. laporan keuangan yang dihasilkan dengan basis akrual memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan, yaitu dapat memberikan	Subjek penelitian ini Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar penelitian penulis dikabupaten Nagan Raya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas topik yang sama yaitu tentang akuntansi berbasis akrual

Tabel 2.1 Lanjutan

			informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam capaian realisasi anggaran namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang lebih valid	
--	--	--	---	--

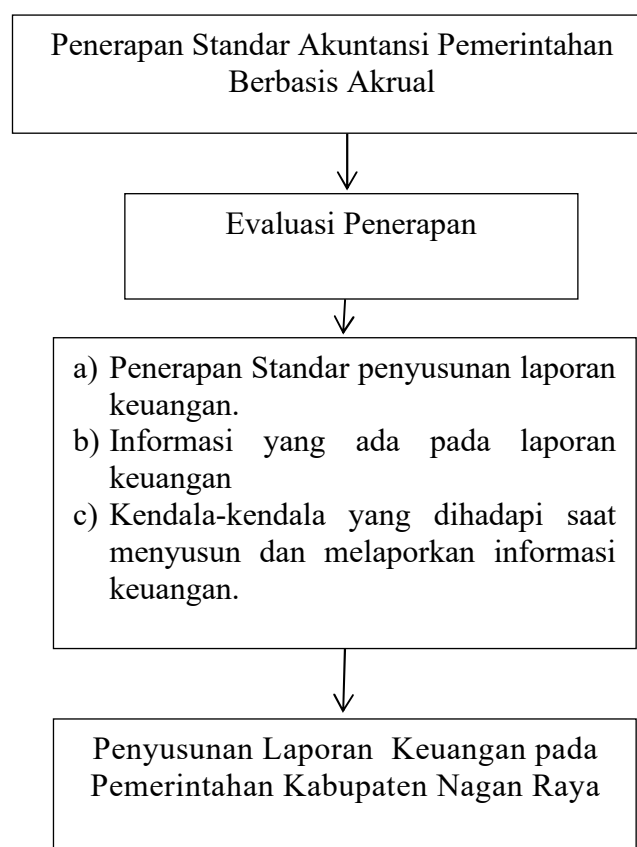
2.6 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, merupakan tahapan akhir dalam penyajian pertanggungjawaban pemerintah. Berdasarkan penjelasan konsep dan teori sebelumnya maka, skema kerangka pemikiran evaluasi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pada pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negri nomor 64 tahun 2013 Pengertian Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Syarienda dkk (2018) yang membahas tentang langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah penerapan akuntansi berbasis akrual dengan mengambil studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menyatakan pelaksanaan penerapan

akuntansi berbasis akrual pada Pemda Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa mengadopsi sistem baru dalam sebuah entitas tidaklah mudah, diperlukan suatu proses yang harus ditempuh untuk merubah sistem yang ada dengan melakukan perubahan pada beberapa aspek. Kemudian pada pelaksanaannya ditemui permasalahan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai baik dari segi pengalaman maupun dari latar belakang pendidikan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dalam penelitian saya ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif interpretif. Penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2016: 6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain- lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagaimetode yang alamiah.

Peneliti memilih pendekatan interpretif dikarenakan dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menginterpretasi sejauh mana kesiapan instansi pemerintah menuju penerapan standar akuntansi pemerintahan baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Realita mengenai kesiapan menuju penerapan akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintah ini didasarkan pada persiapan yang telah dilakukan pemerintah RI, kendala yang dihadapi menuju implementasi, serta respon organisasi dan sikap individu/pegawai dalam menerima perubahan SAP berbasis akrual.

3.1.1 Jenis Investigasi

Jenis investigasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif merupakan metode yang menganalisis dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang diteliti melalui data-data yang telah ada.

3.1.2 Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya Komplek Perkantoran Suka Makmue JL. Poros utama, lueng baro, Kec. Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh 23671. Sedangkan waktu penelitian ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2022.

3.1.3 Tingkat Keterlibatan Peneliti

Keterlibatan peneliti disini adalah peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data tentang penyajian laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Oleh karena itu unit analisis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan staff Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual.

3.2 Objek Penelitian

Lingkup objek dalam penelitian yang ditetapkan penulis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu evaluasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual Pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengertian standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

yang dikemukakan oleh PP No.71 Tahun 2010 yaitu untuk mengevaluasi penerapan standar akuntansi di Pemkab Nagan Raya.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya, yaitu dengan pegawai di bidang Akuntansi, Subbid. Penerimaan dan Pengeluaran dan Subbid Verifikasi dan Pelaporan. Selain itu, data lain yang ditemukan langsung oleh peneliti di lokasi, seperti dokumentasi berupa foto dan rekaman.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Beberapa yang dapat diperoleh dari observasi adalah tempat, pelaku kegiatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Dilakukannya observasi ialah berguna untuk menyajikan gambaran yang realistis perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan, dan membantu mengerti perilaku informan. Dan juga untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dan melakukan umpan balik terhadap pengukuran. Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan

atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) apakah telah sesuai.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan disini adalah wawancara semi struktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* (wawancara mendalam), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya

3. Dokumentasi

Dokumentasi disini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat kejadian yang ada dilapangan dengan memanfaatkan data sekunder yang ada. Data atau dokumentasi tersebut sebagai tambahan atau pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya berupa laporan-laporan, catatan-catatan, dan rekaman data kinerja dan materi pendukung lainnya.

3.5 Analisis Data Sumber data

1. Teknik pengolahan

Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data berupa penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan

dengan melakukan wawancara dan dokumentasi pada entitas yang akan dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan akurat yang berguna dalam penelitian.

2. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis dari data yang diperoleh dengan menggunakan kata-kata atau kalimat dengan dasar teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan berfungsi sebagai penjelasan atas analisis data tersebut. Langkah-langkah teknis analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, mengidentifikasi, serta mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai implementasi dan optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan.
2. Mempelajari dan mengolah data yang diperoleh dari PEMKAB Kabupaten Nagan Raya.
3. Memberikan kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan.

3.6 Pengujian Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Biasanya ada empat teknik yang digunakan yaitu triangulasi sumber data, triangulasi teori, triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, akan tetapi dalam penelitian ini hanya tiga teknik yang digunakan yaitu sebagai berikut (Sugiyono, 2016:20):

- a. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya melalui

sumber data utama yaitu wawancara, peneliti bisa memperoleh sumber data pendukung seperti dokumen laporan keuangan yang ditunjukkan informan sebagai bukti sehingga data/keterangan dari informan lebih akurat.

- b. Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan teori yang relevan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang sifatnya tidak bias.
- c. Penarikan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah yang tempatnya terletak di Jalan Perkantoran Suka Makmue Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Letak kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah sangat strategis dan mudah dijangkau bagi masyarakat. Berkenaan dengan lokasi yang ditentukan, maka peneliti tertarik untuk memilih lokasi melakukan penelitian kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk menjadi objek penelitian, karena kantor tersebut merupakan kantor yang berwenang mengenai laporan keuangan pada pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.

4.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Nagan Raya termasuk wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0-12 meter di atas permukaan laut yang terletak dalam koridor bagian barat Provinsi Aceh yaitu pada jalur Barat-Selatan, dan secara geografis berada pada posisi 43' 50" – 04o 37' 55" Lintang Utara (LU) dan 96o 11' 23" – 96o 47' 58" Bujur Timur (BT) berupa daratan dengan luas wilayah 3.544,91 Km² (354.491,05 Ha), atau sekitar 6,25% dari luas wilayah Provinsi Aceh. Adapun peta wilayah administrasi Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini:

Gambar 4.1
Peta wilayah administrasi Kabupaten Nagan Raya



Sumber: *naganrayakab.go.id*

Batas-batas administrasi Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya
- c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat

Secara administrasi, sampai dengan akhir tahun 2018 Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 10 Kecamatan. Kecamatan Darul Makmur mempunyai luas wilayah terluas yaitu 1.027,93 km² atau 29,00 persen luas wilayah kabupaten. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Beutong dengan luas 1.017,32 km² atau 28,70 persen. Kecamatan Tadu Raya, Seunagan Timur, Tripa Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Seunagan dan Suka Makmue mempunyai luas 11,45 %, 9,97 %, 7,10 %, 3,41 %, 2,15 %, 1,60 %, dan 1,45 %.

Topografis wilayah Kabupaten Nagan Raya secara umum terbagi atas 3 sub area:

- a. Kawasan Utara, merupakan wilayah pengunungan yang memiliki tanah relatif cukup subur, sebagian mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian lagi berbukit-bukit, meliputi Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Beutong dan Sebagian Seunagan Timur.
- b. Kawasan Tengah, sebagian besar merupakan tanah pertanian dengan jaringan irigasi yang cukup bagus sehingga sangat cocok untuk wilayah pengembangan padi dan palawija. Adapun kawasan tengah meliputi Kecamatan Seunagan, Kuala, Suka Makmue dan sebagian Kecamatan Tadu Raya dan Darul Makmur.
- c. Kawasan Selatan, merupakan kawasan pesisir pantai, cocok untuk kawasan pengembangan perikanan dan kelautan yang meliputi Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Darul Makmur.

4.1.2 Kondisi Demografis

Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 10 Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tahun 2022 sebesar 173.393 jiwa. Penyebaran penduduk Kabupaten Nagan Raya di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Darul Makmur	51.336
2.	Tripa Makmur	9.208
3.	Kuala	23.004
4.	Kuala Pesisir	17.912
5.	Tadu Raya	15.424
6.	Beutong	13.837
7.	Beutong Ateu Banggalang	2.039

8.	Seunagan	16.105
9.	Suka Makmue	10.274
10.	Seunagan Timur	14.254
Jumlah		173.393

Sumber: Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka, 2023

Berdasarkan penjelasan pada Tabel 4.1 di atas, mayoritas penduduk terbanyak yang ada di Kabupaten Nagan Raya menurut BPS pada Tahun 2023 berada di Kecamatan Darul Makmur yakni sebesar 51.336 jiwa, disusul oleh Gampong Ujong Kuala yakni berjumlah 23.004 jiwa, sedangkan Kecamatan Beutong Ateu Banggalang, merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit, yaitu berjumlah 2.039 jiwa.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini adalah tentang evaluasi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dimana pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya. Adapun yang menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

1. Desry Wahyuni, S.E., M.Si.Ak., yaitu sebagai Kepala Bidang Akuntansi di BPKD Kabupaten Nagan Raya
2. Nelda Hastuti, S.E., yaitu sebagai pegawai SubBid. Penerimaan dan pengeluaran di BPKD Kabupaten Nagan Raya
3. Teuku Irwansyah, S.E., yaitu sebagai pegawai SubBid. Verifikasi dan Pelaporan di BPKD Kabupaten Nagan Raya.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *key person* yaitu informan yang dapat memberi petunjuk lebih mendalam tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

4.2.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Nagan Raya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada saat ini menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 berdasarkan aturan yang ditetapkan. Proses penerapan PP No. 71 tahun 2010 ini sendiri diawali dengan membuat regulasi di daerah dan setelah regulasi di daerah ditetapkan baru disosialisasikan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Dalam menyusun laporan keuangan, sebagai instansi pemerintahan vertikal maka BPKD Kabupaten Nagan Raya menggunakan aplikasi SIMDA dan juga menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagaimana tahapan yang ada dalam aplikasi tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Teuku Irwansyah, S.E., yaitu sebagai pegawai SubBid. Verifikasi dan Pelaporan di BPKD Kabupaten Nagan Raya, sebagai berikut:

“Untuk sekarang ini laporan keuangan kita berdasarkan dari Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan PSAP berbasis akrual dan PP 71 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan berbasis kas (untuk Pendapatan-LRA) oleh SKPK dan PPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBK, tidak termasuk perusahaan daerah. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Pendapatan Pemerintah Kabupaten mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan. Tapi sekarang untuk Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) masih dibuat secara manual dengan menggunakan *Microsoft word* dan digabungkan dengan *Microsoft excel*, Calk belum memiliki aplikasi sendiri dikarenakan belum terintegrasinya antara aset dan keuangan”. (Hasil Wawancara tanggal 13 Februari 2023)

Tidak semua komponen dari laporan keuangan seperti yang termaksud dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 terdapat dalam laporan keuangan di BPKD Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana yang juga disebutkan oleh Kepala Bidang Akuntansi di BPKD Kabupaten Nagan Raya, yaitu Ibu Desry Wahyuni, S.E., M.Si.Ak., sebagai berikut:

“Kita pun ada kebijakan akuntansinya sendiri juga, harus sesuai juknis (petunjuk teknis), ada juga namanya Bagan Akun standar (daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah). BPKD Kabupaten Nagan Raya inikan Non BLU (Badan Layanan Umum), jadi tidak ada SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) atau SiKPA (selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan), meskipun tidak ada pendapatan. BPKD Kabupaten Nagan Raya tetap memiliki kas yang diperoleh dari anggaran pemerintah. Tiap akhir tahun saldo kas harus nihil. Apabila ada justru menjadi temuan. Kita mengikuti sistem saja, untuk melihat arus kasnya dapat kita lihat di Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRAB)” (Hasil Wawancara tanggal 13 Februari 2023)

Seluruh informasi yang ada ditampilkan pada pelaporan keuangan di BPKD Kabupaten Nagan Raya dilampirkan dengan benar dan dapat

dipertanggungjawabkan, hal ini diketahui berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi di BPKD Kabupaten Nagan Raya yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pemkab Nagan Raya memang sudah lebih dulu menggunakan akrual basis, yang sebelumnya memang menggunakan basis kas menuju akrual. Kalau untuk laporan keuangan yang disajikan, diantaranya yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan itu memang memberikan informasi keuangan yang diberikan dengan jelas dan informasi yang disajikan BPKD Nagan Raya merupakan informasi yang telah diverifikasi artinya informasi yang disajikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan”. (Hasil Wawancara tanggal 13 Februari 2023)

Dalam penyusunan laporan keuangan, BPKD Nagan Raya menggunakan aplikasi SIMDA, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nelda Hastuti, S.E., selaku pegawai SubBid. Penerimaan dan pengeluaran di BPKD Kabupaten Nagan Raya, yang mengatakan bahwa:

“Mengenai aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di BPKD Kabupaten Nagan Raya adalah memakai Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), yang bertujuan membantu pemerintah daerah dalam membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai. Aplikasi ini sangat membantu, karena dalam pengelolaan keuangan secara terintegrasi, memanfaatkan teknologi informasi, dari perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan di SKPD di Kabupaten Nagan Raya. Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan sumber daya manusia dan perangkat pendukung memang sudah tersedia.” (Hasil Wawancara tanggal 16 Februari 2023).

Berdasarkan dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan PSAP berbasis akrual dan PP

71 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan di BPKD Kabupaten Nagan Raya terdiri dari laporan yang memang sudah terdapat di aplikasi SIMDA yang jika disesuaikan dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 maka laporan tersebut antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca. Sedangkan untuk CaLK BPKD Kabupaten Nagan Raya tetap harus membuatnya, sebab setiap instansi yang menggunakan anggaran pemerintah daerah harus melaporkan setiap keuangan atau penggunaan dana yang di kucurkan kepada mereka, itulah sebabnya walaupun di BPKD Kabupaten Nagan Raya yang merupakan Instansi non BLU juga harus tetap membuat CaLK.

4.2.2 Informasi yang Diungkapkan Dalam Laporan Keuangan

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan di BPKD Kabupaten Nagan Raya Seperti menurut pegawai SubBid. Verifikasi dan Pelaporan di BPKD Kabupaten Nagan Raya., yaitu:

“Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel” (Hasil Wawancara tanggal 13 Februari 2023).

Selanjutnya menurut pegawai SubBid. Penerimaan dan pengeluaran di BPKD Kabupaten Nagan Raya, mengatakan bahwa:

“Laporan realisasi anggaran menjelaskan tentang alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang sedang dikelola pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realiasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun anggaran 2021-2020 menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran meliputi pendapatan – LRA, belanja, transfer, Surplus / (defisit), pembiayaan dan Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) (Hasil Wawancara tanggal 16 Februari 2023).

Menurut Kepala Bidang Akuntansi di BPKD Kabupaten Nagan Raya mengatakan bahwa:

“Pada Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas dalam proses penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, setiap transaksi pendapatan dan belanja akan berpengaruh pada pos atau rekening Saldo Anggaran Lebih dalam periode anggaran tahun yang bersangkutan, hal tersebut berbeda dengan laporan realisasi anggaran ketika masih menggunakan basis kas yang mensyaratkan bahwa setiap transaksi pendapatan dan belanja akan berpengaruh pada rekening Kas Umum Negara atau Daerah” (Hasil Wawancara tanggal 13 Februari 2023).

Perubahan kebijakan akuntansi yang semula berbasis kas menuju basis akrual penuh yang dilaksanakan secara bertahap, mengingat kebijakan tersebut adalah suatu kebijakan baru yang tidak dapat dijalankan secara langsung. Untuk menyambut kebijakan akuntansi berbasis akrual BPKD Kabupaten Nagan Raya sudah melakukan berbagai macam persiapan sebagai jembatan untuk dapat menerapkan akrual sepenuhnya sejak dikeluarkannya PP 71 tahun 2010.

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah agar dapat dipahami oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan

negara, maka BPKD Kabupaten Nagan Raya memerlukan Catatan atas Laporan keuangan (CaLK), seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Akuntansi di BPKD Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

“Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara, diperlukan Catatan atas Laporan keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah (Hasil Wawancara tanggal 13 Februari 2023).

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut

1. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca.
6. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya.

Pada catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Adapun gambaran umum tentang Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL
Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten
Nagan Raya

No.	Unsur	Sesuai/Belum	Keterangan
1.	Penyajian Pos-Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Sesuai	LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA,
2.	Penyajian PSAP Paragraf 41-42 Laporan Perubahan Sesuai Pos-pos dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	Sesuai	LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pospos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3.	Penyajian Pos-pos dalam Laporan Neraca	Sesuai	Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4.	Penyajian Pos-pos dalam Laporan Operasional (LO)	Sesuai	LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas

5.	Penyajian Pos-pos Dalam Laporan Arus Kas (LAK)	Sesuai	LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
6.	Penyajian Pos-pos Dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Sesuai	LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir
7.	Penyajian Pos-pos dalam Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Sesuai	CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/ atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Sumber : Data Primer dioalah, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Nagan Raya secara keseluruhan telah menyajikan pos-pos Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Persediaan juga merupakan bagian dari aset lancar yang berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang barang yang dimaksudkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Menurut pegawai SubBid. Penerimaan dan pengeluaran di BPKD Kabupaten Nagan Raya mengatakan bahwa:

“Persediaan pada BPKD Kabupaten Nagan Raya merupakan beban dibayar dimuka, sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Sehingga dalam hal pencatatan ada dua alternatif pendekatan untuk mengakui persediaan ketika ada transaksi pembelian persediaan”. (Hasil Wawancara tanggal 16 Februari 2023)

Pada pendekatan beban, persediaan merupakan beban dibayar di muka, maka dalam pendekatan ini persediaan harus diakui sebagai beban maka di akhir periode harus dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengetahui secara real jumlah persediaan dan beban persediaan yang sudah dikonsumsi. Sedangkan pada pendekatan aset, setiap ada pemakaian persediaan harus dilakukan penjurnalan, sedangkan untuk pendekatan beban harus dilakukan perhitungan fisik pada akhir tahun karena mengingat dalam pendekatan beban, persediaan dianggap sebagai beban dibayar dimuka.

Selain itu perlakuan untuk pengakuan persediaan juga berbeda saat penerapan basis akrual, jika dulu sebelum menerapkan akrual setiap persediaan yang dibeli langsung diakui sebagai realisasi anggaran dan dimasukkan ke dalam LRA secara langsung ketika persediaan tersebut dibeli. Begitu akrual diterapkan maka persediaan tidak bisa sepenuhnya diakui sebagai LRA. Melainkan harus dilihat lagi berapa persediaan tahun lalu yang digunakan untuk tahun berjalan/tahun ini, dan pembelian persediaan pada tahun berjalan/tahun ini namun tersisa di akhir tahun maka tidak bisa diakui sebagai beban dan harus dikeluarkan. Jadi, di LRA persediaan diakui sebagai belanja namun di Laporan Operasional (LO) tidak boleh diakui karena belum digunakan.

4.2.3 Kendala-kendala yang dihadapi Saat Menyusun dan Melaporkan Informasi Keuangan

Terkait dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual, menurut Kepala Bidang Akuntansi di BPKD Kabupaten Nagan Raya, menyatakan bahwa:

“Ada sedikit kendala yang dihadapi dalam hal komunikasi disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang aktual, karena ini kebijakan yang baru diterapkan pasti lah ada kendala terutama dari SDMnya meskipun sudah difasilitasi dengan sistem. SDM di bagian keuangan BPKD Kabupaten Nagan Raya ini ada 12 orang, yang terdiri dari 4 orang honorer dan 8 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saya nggak kerja sendiri, saya menunggu hasil verifikasi dari *verifikator*, setelah dokumen yang akan di inputkan selesai di verifikasi dan di setujui oleh *verifikator* baru bisa saya menginputkannya ke dalam aplikasi. Setelah data di inputkan selesai maka nanti akan di cetak kembali kwitansinya untuk di cocokkan dengan ketersediaan dana, dan jika sudah baru di cocokkan kembali ke aplikasi”. (Hasil Wawancara tanggal 13 Februari 2023)

Penggunaan aplikasi SIMDA memiliki operator untuk memegang aplikasi ini, dimana dalam aplikasi SIMDA ini ada 2 bagian yaitu bagian Aset dan Keuangan, dimana kedua bagian ini belum terintegrasi dengan baik di dalam aplikasi, maka dari itu ini juga merupakan salah satu kendala dalam pembuatan laporan di akhir tahun, karena belum terintegrasinya 2 hal ini di dalam aplikasi. Hal ini dapat dianalisa dari pernyataan pegawai SubBid. Penerimaan dan pengeluaran di BPKD Kabupaten Nagan Raya., berikut:

“Terkadang kita temukan sistem tidak sinkron, bisa karena diwaktu mengupdate aplikasinya, jadi sistem yang lain tidak menerima data. Misalnya, ada dari aset yang belum diregister, kan pegawai keuangan yang berwenang harus nyari lagi, yang mana aset yang belum diregister itu. Tapi, jika misalnya di pembagian tugas itu semua memahami sistem, memang lebih mudah lagi. Lebih cepat juga pekerjaannya. (Hasil Wawancara tanggal 13 Februari 2023)

Latar belakang pendidikan juga tampaknya memiliki peranan yang cukup besar bagi penerapan SIMDA, hal ini seperti yang dikatakan oleh pegawai SubBid. Penerimaan dan pengeluaran di BPKD Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

“Di bagian keuangan BPKD Kabupaten Nagan Raya masih terdapat pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan non keuangan, yaitu ada 2 orang yang pendidikan akhirnya adalah SMA, dan ini ditempatkan di bagian keuangan yang mana sebelumnya belum pernah menangani tentang keuangan mencoba mandiri mengerjakannya, karena kurang memahami

sistem, pada akhirnya sering timbul salah input data dan sebagainya. SIMDA bergerak di bidang keuangan, maka akan sangat memudahkan jika pengguna aplikasi ini memahami tentang bidang keuangan, salah satu penunjangnya adalah memiliki latar pendidikan mengenai keuangan seperti pendidikan ekonomi dan lebih bagus lagi memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi, karena mereka sudah biasa menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan keuangan tersebut dan bidang ilmu mereka juga berada di ranah tersebut, sarannya lebih bagus pegawai yang non keuangan sebelumnya harus aktif bertanya ke bagian keuangan kita untuk mempermudah megaplikasikan sistem tersebut” (Hasil Wawancara tanggal 16 Februari 2023).

Selanjutnya menurut Teuku Irwansyah, S.E., yaitu sebagai pegawai SubBid.

Verifikasi dan Pelaporan di BPKD Kabupaten Nagan Raya terkait dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua, menyatakan bahwa:

"Hambatan yang ditemui dalam hal komunikasi adalah kurangnya pengetahuan pegawai tentang SAP berbasis akrual karena ini merupakan hal baru, tapi hambatan itu bisa di minimalisir karena dekat dari induknya kalau ada hal yang kurang dipahami tentang akrual langsung ditanyakan pada bidang akuntansi selaku sentral pelaporan keuangan, apalagi staf yang ada di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memang dari D3 dan S-1 akuntansi sedikit banyak sudah tau tentang akuntansi, yang agak bingung mungkin dari SKPD lain. Menurut saya sebaiknya pengelola laporan keuangan harus punya dasar pengetahuan akuntansi yang cukup agar komunikasi bisa lancar antara atasan dan staf. Sebaiknya harus banyak mengikuti pelatihan tentang SAP berbasis akrual biar paham, dan biar komunikasi jadi lancar". (Hasil Wawancara tanggal 16 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua dapat disimpulkan bahwa setiap struktur yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual mempunyai sedikit kendala dalam hal komunikasi yang disebabkan karena pengetahuan mengenai SAP berbasis akrual, karena setiap pegawai berbeda-beda sehingga diperlukan adanya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia meskipun sudah difasilitasi dengan sistem. Di BPKD Kabupaten Nagan Raya, penerapan akuntansi

berbasis akrual sudah berjalan dengan baik. Tetapi dari segi kesiapan pegawai publik masih sangat minim untuk sumber daya manusia (staf akuntansi) dengan kualitas yang dibutuhkan dan jarang ada pelatihan atau bimbingan teknis dan sering terjadi *Rolling Staff* atau pergantian staf tentang penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dengan kualitas yang dibutuhkan, begitu pula dengan komitmen dari pimpinan atau atasan dan perangkat pendukungnya dan ini semua juga tidak terlepas dari Kesiapan BPKD Kabupaten Nagan Raya.

4.3 Pembahasan

Fungsi akuntansi pada dasarnya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Melalui pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual Juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan PSAP berbasis akrual dan PP 71 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan di BPKD Kabupaten Nagan Raya terdiri dari laporan yang memang sudah terdapat di aplikasi SIMDA yang jika disesuaikan dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 maka laporan tersebut antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca. Sedangkan untuk CaLK BPKD Kabupaten Nagan Raya tetap harus membuatnya, sebab setiap instansi yang menggunakan anggaran pemerintah daerah harus melaporkan setiap keuangan atau penggunaan dana yang di kucurkan kepada mereka, itulah sebabnya walaupun di BPKD Kabupaten Nagan Raya yang merupakan Instansi non BLU juga harus tetap membuat CaLK.

Salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu komitmen dari pimpinan atau atasan yang harus diterapkan dan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan, agar penerapan akuntansi berbasis akrual dapat berhasil dan juga merupakan bukti pertanggung jawaban uang yang dikelola oleh BPKD Kabupaten Nagan Raya secara transparan kepada masyarakat serta tetap menjalankan aturan pemerintah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengemukakan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sehingga dalam melaksanakan implementasi

akuntansi berbasis akrual guna melaksanakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel serta memberikan dukungan dengan peraturan sarana prasarana dan Sumber daya Manusia.

Berdasarkan hasil penelitian Lamonisi (2016), sumber daya manusia yang mampu menggerakkan keberhasilan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang berkualitas baik. Hal ini dapat diperoleh melalui pendidikan maupun pelatihan baik pelatihan manajerial maupun teknis fungsional. Dengan demikian sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Pendidikan dan latihan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan tertentu adalah sama dengan konsep belajar.

Penerapan SAP Berbasis Akrual mengharuskan pemerintah menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Untuk itu, pemerintah harus memiliki perencanaan SDM guna memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM, khususnya SDM pengelola keuangan, aset, dan teknologi informasi (TI). Pemerintah juga perlu melakukan optimalisasi SDM melalui pelatihan/sosialisasi penerapan SAP berbasis akrual untuk meningkatkan kompetensi SDM yang ada, serta meminimalisasi risiko ketidak andalan penyajian laporan keuangan. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dibanding dengan berbagai sumber daya lainnya, seperti modal, peralatan, teknologi, dan sebagainya. Sumber daya dikatakan paling penting bagi organisasi karena hanya sumber daya manusia yang mampu menggerakkan sumber daya organisasi lainnya, sehingga kegiatan suatu organisasi dilaksanakan secara efektif dan efisien.

BPKD Kabupaten Nagan Raya telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui program integrasi *training* dengan materi akuntansi akrual dan aplikasi pendukungnya secara intensif dengan dukungan Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga, program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah, Akan tetapi, berbagai program tersebut masih belum dapat memberikan pemahaman secara maksimal untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Pemda juga telah menganggarkan pelatihan dan pengembangan SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan dalam Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan akuntansi berbasis akrual khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya tidak terlepas dari komitmen dari pimpinan, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. BPKD Kabupaten Nagan Raya telah melakukan penerapan akuntansi berbasis akrual secara akurat dan jelas, sehingga akuntansi berbasis akrual tersebut dapat memberikan informasi keuangan yang lebih baik untuk dasar akuntabilitas Pemerintah.
2. Informasi yang ada pada Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya antara lain, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual.
3. Kendala yang dihadapi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah adalah berasal kualitas Sumber daya manusia yang dibutuhkan, masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami akuntansi berbasis akrual,

ini lebih disebabkan sering terjadinya pergantian (*rolling*) pegawai terutama untuk staf akuntansi di setiap BPKD Kabupaten Nagan Raya.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah agar penerapan basis akrual ini tetap berjalan dengan baik, kinerja pegawai dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya dapat lebih di tingkatkan, maka perlu pemberian sosialisasi, motivasi disertai pelatihan secara berskala kepada para pegawai antara lain terutama yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan agar implementasi SAP berbasis akrual secara penuh dapat berjalan optimal dan lebih memperhatikan masalah gaji yang sesuai dengan hasil kerja serta tugas atau pekerjaan agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Basukianto, Febrian Cahyo Pradono. (2015) *"Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)." Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Hal (2015): 188-200.*
- Djp Kemenkeu. (2020) . *Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah* . Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- Hidayat, Wastam Wahyu, et al. (2018). *Dasar-dasar analisa laporan keuangan. Uwais Inspirasi Indonesia.*
- Kaloh, Trisilia . Ventje Ilat. Sonny Pangerapan. (2018). *Analisis Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.* Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4)
- Leksono, Berbudi Sandhi. (2017) *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 Dan 2015 Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Diponegoro* . Journal Of Accounting Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Munandar, rahmat. (2022). <https://www.naganrayakab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/pemkab-nagan-raya-kembali-raih-wtp-dari-bpk-ri>
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance.* Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No.1: 1-17.
- Nasution, D. A. D. (2018). *Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah.* Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan, 2(3), 149-162.
- Najati, Ida. (2016) *Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual : Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga* . Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 14 No. 1 Juni
- Ridwan , (2019) *Implementasi Akuntansi Sektor Publik Berbasis Akrual Dalam Mewujudkan Good Government Governance Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang* . Skripsi .

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Pt Alfabet
- Syarienda.2018. *Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah* Vol 4 No 1, Maret 2018 Issn. 2502-697
- Widianti, H., Hadiyati, S.N., & Sulistyowati, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi AkruaI pada Sektor Pemerintah. *Jurnal SENIT* 2016, 1(1), 155-162
- Yusuf, Ayus Ahmad .(2017). *Analisis Penggunaan Metode Pencatatan Cash Basis Dan Accrual Basis Pada Transaksitransaksi Di Bank Syariah*.*Jurnal al-Amwal*, Volume 9, No. 1 Tahun 2017

Lampiran 1**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Foto 1: Bersama Pegawai di BPKD Kabupaten Nagan Raya



Foto 2: Kepala Bidang Akuntansi di BPKD Kabupaten Nagan Raya



Foto 3: Pegawai SubBid. Penerimaan dan pengeluaran di BPKD Kabupaten Nagan Raya



Foto 4: Pegawai SubBid. Verifikasi dan Pelaporan di BPKD Kabupaten Nagan Raya

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses penyusunan hingga pelaporan informasi keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya ?
2. Apa seluruh informasi diungkapkan dalam pelaporan keuangan oleh BPKD Kabupaten Nagan Raya?
3. Apakah informasi yang dilaporkan dilampirkan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan ?
4. Dalam penerapan akuntansi pemerintah, sistem aplikasi apa yang digunakan ? Apakah membantu dalam penyusunan laporan keuangan ?
5. Dalam penyusunan hingga pelaporan kendala apa yang dihadapi ?

Lampiran 3

PEDOMAN LEMBAR OBSERVASI

No.	Unsur	PP 71	LKPD	Sesuai/Belum	Keterangan
1.	Penyajian Pos-Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)				
2.	Penyajian PSAP Paragraf 41-42 Laporan Perubahan Sesuai Pos-pos dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)				
3.	Penyajian Pos-pos dalam Laporan Neraca				
4.	Penyajian Pos-pos dalam Laporan Operasional (LO)				
5.	Penyajian Pos-pos Dalam Laporan Arus Kas (LAK)				
6.	Penyajian Pos-pos Dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)				
7.	Penyajian Pos-pos dalam Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)				

Lampiran 4

TRANSKRIP WAWANCARA

Bagian : Kepala Bidang Akuntansi di BPKD Kabupaten Nagan Raya
Nama : Desry Wahyuni, S.E., M.Si.Ak

Peneliti	: Bagaimana proses penyusunan hingga pelaporan informasi keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya ?
Informan	: Maksudnya proses penyusunan laporan? Hmmm...Kita pun ada kebijakan akuntansinya sendiri juga, harus sesuai juknis (petunjuk teknis), ada juga namanya Bagan Akun standar (daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah). Eee.....BPKD Kabupaten Nagan Raya inikan Non BLU (Badan Layanan Umum), jadi tidak ada SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) atau SiKPA (selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan), meskipun tidak ada pendapatan. Hmmm....BPKD Kabupaten Nagan Raya tetap memiliki kas yang diperoleh dari anggaran pemerintah. Tiap akhir tahun saldo kas harus nihil. Apabila ada justru menjadi temuan. Kita mengikuti sistem saja, untuk melihat arus kasnya dapat kita lihat di Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRAB), kira-kira demikian.
Peneliti	: Apa seluruh informasi diungkapkan dalam pelaporan keuangan oleh BPKD Kabupaten Nagan Raya?
Informan	: Naaa...eee....Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pemkab Nagan Raya memang sudah lebih dulu menggunakan akrual basis, yang sebelumnya memang menggunakan basis kas menuju akrual. Laporan keuangan kita.....e....Kalau untuk laporan keuangan yang disajikan, diantaranya yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan itu memang memberikan informasi keuangan yang diberikan dengan jelas dan informasi yang disajikan BPKD Nagan Raya merupakan informasi yang telah diverifikasi artinya informasi yang disajikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Peneliti	: Apakah informasi yang dilaporkan dilampirkan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan ?
Informan	: Hmmm....yaaa...Pada Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas dalam proses penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, setiap transaksi pendapatan dan belanja akan berpengaruh pada pos atau rekening Saldo Anggaran

	Lebih dalam periode anggaran tahun yang bersangkutan. Begini dek.....tapi ini agak berbeda dengan laporan realisasi anggaran ketika masih menggunakan basis kas yang mensyaratkan bahwa setiap transaksi pendapatan dan belanja akan berpengaruh pada rekening Kas Umum Negara atau Daerah ya....
Peneliti	: Dalam penerapan akuntansi pemerintah, sistem aplikasi apa yang digunakan ? Apakah membantu dalam penyusunan laporan keuangan ?
Informan	: Eee.....Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara, diperlukan Catatan atas Laporan keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Mengenai CaLK ini...hmmm apa ya... di dalam CaLK ini kan...memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah
Peneliti	: Dalam penyusunan hingga pelaporan kendala apa yang dihadapi ?
Informan	: Ee....Ada sedikit kendala yang dihadapi dalam hal komunikasi disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang aktual, karena ini kebijakan yang baru diterapkan pasti lah ada kendala terutama dari SDMnya meskipun sudah difasilitasi dengan sistem. Hmm....gini dek....SDM di bagian keuangan BPKD Kabupaten Nagan Raya ini ada 12 orang, yang terdiri dari 4 orang honorer dan 8 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ee...disini, saya nggak kerja sendiri, saya menunggu hasil verifikasi dari <i>verifikator</i> , setelah dokumen yang akan di inputkan selesai di verifikasi dan di setujui oleh <i>verifikator</i> baru bisa saya menginputkannya ke dalam aplikasi. Setelah data di inputkan selesai maka nanti akan di cetak kembali kwitansinya untuk di cocokkan dengan ketersediaan dana, dan jika sudah baru di cocokkan kembali ke aplikasi, begitu dek.

Bagian : **Pegawai SubBid. Penerimaan dan pengeluaran di BPKD Kabupaten Nagan Raya**

Nama : **Nelda Hastuti, S.E.**

Peneliti	: Apa seluruh informasi diungkapkan dalam pelaporan keuangan oleh BPKD Kabupaten Nagan Raya?
Informan	: Eemm...tentang aplikasi ya dek ?...Mengenai aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di BPKD Kabupaten Nagan Raya adalah memakai Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), yang bertujuan membantu pemerintah daerah dalam membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai. Begini dek....aaa..Aplikasi ini sangat membantu, karena dalam

	<p>pengelolaan keuangan secara terintegrasi, memanfaatkan teknologi informasi, dari perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan di SKPD di Kabupaten Nagan Raya. Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan sumber daya manusia dan perangkat pendukung memang sudah tersedia.</p>
Peneliti	: Apakah informasi yang dilaporkan dilampirkan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan ?
Informan	: Hmm...Laporan realisasi anggaran menjelaskan tentang alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang sedang dikelola pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Eeeng...Laporan realiasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun anggaran 2021-2020 menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran meliputi pendapatan – LRA, belanja, transfer, Surplus / (defisit), pembiayaan dan Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)
Peneliti	: Dalam penerapan akuntansi pemerintah, sistem aplikasi apa yang digunakan? Apakah membantu dalam penyusunan laporan keuangan ?
Informan	: Oooo...itu ada pada persediaan, jadi persediaan pada BPKD Kabupaten Nagan Raya merupakan beban dibayar dimuka, sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Sehingga dalam hal pencatatan ada dua alternatif pendekatan untuk mengakui persediaan ketika ada transaksi pembelian persediaan.
Peneliti	: Dalam penyusunan hingga pelaporan kendala apa yang dihadapi ?
Informan	: Mengenai kendala...gimana ya....Terkadang kita temukan sistem tidak sinkron, bisa karena diwaktu mengupdate aplikasinya, jadi sistem yang lain tidak menerima data. Kayak...hmm...Misalnya, ada dari aset yang belum diregister, kan pegawai keuangan yang berwenang harus nyari lagi, yang mana aset yang belum diregister itu. Tapi, jika misalnya di pembagian tugas itu semua memahami sistem, memang lebih mudah lagi. Lebih cepat juga pekerjaannya. Hmmm....itu kan dek....apa yaa.. Di bagian keuangan BPKD Kabupaten Nagan Raya masih terdapat pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan non keuangan, yaitu ada 2 orang yang pendidikan akhirnya adalah SMA, dan ini ditempatkan di bagian keuangan yang mana sebelumnya belum pernah menangani tentang keuangan mencoba mandiri mengerjakannya, karena kurang memahami sistem, pada akhirnya sering timbul salah input data dan

sebagainya. SIMDA bergerak di bidang keuangan, maka akan sangat memudahkan jika pengguna aplikasi ini memahami tentang bidang keuangan, salah satu penunjang nya adalah memiliki latar pendidikan mengenai keuangan seperti pendidikan ekonomi dan lebih bagus lagi memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi, karena mereka sudah biasa menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan keuangan tersebut dan bidang ilmu mereka juga berada di ranah tersebut, sarannya lebih bagus pegawai yang non keuangan sebelumnya harus aktif bertanya ke bagian keuangan kita untuk mempermudah megaplikasikan sistem tersebut

**Bagian : Pegawai SubBid. Verifikasi dan Pelaporan di BPKD
Kabupaten Nagan Raya**

Nama : Teuku Irwansyah, S.E.

Peneliti	: Bagaimana proses penyusunan hingga pelaporan informasi keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya ?
Informan	: Mengenai proses penyusunan ya.....eeee, untuk sekarang ini laporan keuangan kita berdasarkan dari Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan PSAP berbasis akrual dan PP 71 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan berbasis kas (untuk Pendapatan-LRA) oleh SKPK dan PPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBK, tidak termasuk perusahaan daerah. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Pendapatan Pemerintah Kabupaten mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan, alurnya seperti itu....teruss...eeee, Tapi sekarang untuk Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) masih dibuat secara manual dengan menggunakan <i>Microsoft word</i> dan digabungkan dengan <i>Microsoft excel</i> , Calk belum memiliki aplikasi sendiri dikarenakan belum terintegrasinya antara aset dan keuangan
Peneliti	: Apakah informasi yang dilaporkan dilampirkan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan ?
Informan	: Ya dapat la dek....itu semua harus dapat dipertanggungjawabkan, kalau nggak habis la kita...hhaha..eee, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.
Peneliti	: Dalam penyusunan hingga pelaporan kendala apa yang dihadapi ?
Informan	: Pasti ada ya.....tentang hambatan itu, apa-apa aja ya....sebentar dek,

Hambatan yang kita temui kayak komunikasi. Komunikasi adalah kurangnya pengetahuan pegawai tentang SAP berbasis akrual karena ini merupakan hal baru, tapi hambatan itu bisa di minimalisir karena dekat dari induknya kalau ada hal yang kurang dipahami tentang akrual langsung ditanyakan pada bidang akuntansi selaku sentral pelaporan keuangan, apalagi staf yang ada di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memang dari D3 dan S-1 akuntansi sedikit banyak sudah tau tentang akuntansi, yang agak bingung mungkin dari SKPD lain. Menurut saya sebaiknya pengelola laporan keuangan harus punya dasar pengetahuan akuntansi yang cukup agar komunikasi bisa lancar antara atasan dan staf. Sebaiknya harus banyak mengikuti pelatihan tentang SAP berbasis akrual biar paham, dan biar komunikasi jadi lancar.

Lampiran 5

**CONTOH LAPORAN KEUANGAN DI BPKD KABUPATEN
NAGAN RAYA**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
(Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020)**

Uraian	Ref	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
PENDAPATAN	G.5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	G.5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	G.5.1.1.1.1	12.937.919.380,00	15.698.967.022,14	121,34	15.373.830.424,00
Pendapatan Retribusi Daerah	G.5.1.1.1.2	1.085.098.683,00	1.207.174.900,00	111,25	1.114.023.375,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	G.5.1.1.1.3	1.200.000.000,00	2.447.755.261,00	203,98	2.925.320.229,00
Lain-lain PAD Yang Sah	G.5.1.1.1.4	84.909.524.876,00	79.053.409.467,15	93,10	89.649.456.895,57
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		100.132.542.939,00	98.407.306.650,29	98,28	109.062.630.923,57
PENDAPATAN TRANSFER	G.5.1.1.2				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN	G.5.1.1.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.1.1	22.313.450.925,00	28.306.464.549,00	126,86	9.078.391.591,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	G.5.1.1.2.1.2	8.143.380.513,00	8.883.984.929,00	109,09	6.230.975.412,00
Dana Alokasi Umum	G.5.1.1.2.1.3	477.108.051.000,00	477.108.051.000,00	100,00	485.041.973.000,00
Dana Alokasi Khusus	G.5.1.1.2.1.4	155.843.326.000,00	147.020.725.875,00	94,34	135.970.798.517,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		663.408.208.438,00	661.319.226.353,00	99,69	636.322.138.520,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	G.5.1.1.2.2				
Dana Penyesuaian	G.5.1.1.2.2.1	201.895.208.000,00	201.895.208.000,00	100,00	194.783.734.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		201.895.208.000,00	201.895.208.000,00	100,00	194.783.734.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	G.5.1.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.3.1	65.376.495.840,00	29.233.056.629,00	44,71	32.432.076.903,00
Bantuan Keuangan Provinsi	G.5.1.1.2.3.2	94.368.230.519,00	90.948.227.681,00	96,38	147.511.283.451,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		159.744.726.359,00	120.181.284.310,00	75,23	179.943.360.354,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.025.048.142.797,00	983.395.718.663,00	95,94	1.011.049.232.874,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	G.5.1.1.3				
Pendapatan Hibah	G.5.1.1.3.1	20.654.085.265,00	20.523.470.500,00	99,37	23.876.770.069,36
Pendapatan Lainnya	G.5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		20.654.085.265,00	20.523.470.500,00	99,37	23.876.770.069,36
JUMLAH PENDAPATAN		1.145.834.771.001,00	1.102.326.495.813,29	96,20	1.143.988.633.866,93

Sumber: Data laporan Keuangan kabupaten Nagan Raya

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Ref	2021	2020
Saldo Anggaran Lebih	G.5.2.1	16.782.796.316,34	5.311.991.766,41
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	G.5.2.2	16.782.796.316,34	5.311.991.766,41
Subtotal		0,00	0,00
Sisi Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	G.5.2.3	32.326.776.369,16	16.849.989.636,34
Subtotal		32.326.776.369,16	16.849.989.636,34
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	G.5.2.4	0,00	0,00
Lain-lain	G.5.2.5	0,00	(67.193.320,00)_
Saldo Anggaran Lebih Akhir	G.5.2.6	32.326.776.369,16	16.782.796.316,34

Sumber: Data laporan Keuangan kabupaten Nagan Raya

NERACA
Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Ref	2021	2020
ASET	G.5.3.1		
Aset Lancar	G.5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah dan Setara Kas	G.5.3.1.1.1	22.627.963.917,20	5.215.099.895,88
Kas di Bendahara Pengeluaran	G.5.3.1.1.2	56.090.406,99	478.838,96
Kas di Bendahara Penerimaan	G.5.3.1.1.3	0,00	0,00
Kas di FKTP	G.5.3.1.1.4	251.781.257,47	674.288.153,00
Kas di BLUD	G.5.3.1.1.5	9.382.846.393,00	10.823.868.164,00
Kas BOS	G.5.3.1.1.6	8.094.394,50	69.061.264,50
Kas Lainnya	G.5.3.1.1.7	5.500.000,00	0,00
Piutang Pajak	G.5.3.1.1.8	16.260.948.043,00	14.437.156.679,00
Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.9	5.610.000,00	5.610.000,00
Penyisihan Piutang	G.5.3.1.1.10	(9.115.177.952,50)	(7.190.149.919,30)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	G.5.3.1.1.11	7.953.899.800,00	8.608.727.400,00
Piutang Pendapatan TransferPemerintah Pusat	G.5.3.1.1.12	0,00	4.254.392.645,00
Piutang Pendapatan TransferPemerintah Provinsi	G.5.3.1.1.13	7.444.018.026,00	4.867.339.810,00
Belanja Dibayar Dimuka	G.5.3.1.1.14	66.035.037,60	62.796.313,15
Persediaan	G.5.3.1.1.15	10.477.026.701,02	10.938.109.156,69
Jumlah Aset Lancar		65.424.636.024,28	52.766.778.400,88
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Permanen	G.5.3.1.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	G.5.3.1.2.1	12.750.000.000,00	11.750.000.000,00
Jumlah Investasi Permanen		12.750.000.000,00	11.750.000.000,00
Aset Tetap	G.5.3.1.3		
Tanah	G.5.3.1.3.1	221.764.019.672,00	181.822.569.588,00
Peralatan dan Mesin	G.5.3.1.3.2	429.588.659.456,00	406.127.059.953,00
Gedung dan Bangunan	G.5.3.1.3.3	1.001.919.049.736,00	952.420.251.321,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	G.5.3.1.3.4	1.403.651.115.148,00	1.295.095.927.380,00
Aset Tetap Lainnya	G.5.3.1.3.5	49.642.062.390,00	47.707.570.502,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	G.5.3.1.3.6	135.886.068.794,00	135.762.825.159,00
Akumulasi Penyusutan	G.5.3.1.3.7	(1.107.342.866.207,00)	(988.331.606.661,00)
Jumlah Aset Tetap		2.135.108.108.989,00	2.030.604.597.242,00

Sumber: Data laporan Keuangan kabupaten Nagan Raya

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Waktu Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Ref	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	G.5.4.1		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	G.5.4.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	G.5.4.1.1.1	17.522.313.393,14	16.949.121.472,00
Pendapatan Retribusi Daerah	G.5.4.1.1.2	1.148.174.900,00	1.114.023.375,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	G.5.4.1.1.3	2.447.755.261,00	2.925.320.229,00
Lain-lain PAD Yang Sah	G.5.4.1.1.4	77.603.202.134,15	64.904.293.295,57
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		98.721.445.688,29	85.892.758.371,57
PENDAPATAN TRANSFER	G.5.4.1.2		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN	G.5.4.1.2.1		
Dana Bagi Hasil Pajak	G.5.4.1.2.1.1	24.794.629.514,00	11.698.508.767,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	G.5.4.1.2.1.2	8.141.427.319,00	6.548.567.104,00
Dana Alokasi Umum	G.5.4.1.2.1.3	477.108.051.000,00	485.041.973.000,00
Dana Alokasi Khusus	G.5.4.1.2.1.4	147.020.725.875,00	135.970.798.517,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		657.064.833.708,00	639.259.847.388,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	G.5.4.1.2.2		
Dana Penyesuaian	G.5.4.1.2.2.1	201.895.208.000,00	194.783.734.000,00
Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat Lainnya		201.895.208.000,00	194.783.734.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	G.5.4.1.2.3		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.4.1.2.3.1	30.534.272.494,00	28.706.681.337,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	G.5.4.1.2.3.2	90.948.227.681,00	147.511.283.451,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		121.482.500.175,00	176.217.964.788,00
Jumlah Pendapatan Transfer		980.442.541.883,00	1.010.261.546.176,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	G.5.4.1.3		
Pendapatan Hibah	G.5.4.1.3.1	62.268.566.503,00	29.036.005.608,36
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		62.268.566.503,00	29.036.005.608,36
JUMLAH PENDAPATAN		1.141.432.554.074,29	1.125.190.310.155,93

Sumber: Data laporan Keuangan kabupaten Nagan Raya

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Desember 2021 dan 2020

Uraian	Reff	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	G.5.5.1		
Arus Masuk Kas	G.5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		15.698.967.022,14	15.373.830.424,00
Penerimaan Retribusi Daerah		1.207.174.900,00	1.114.023.375,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.447.755.261,00	2.925.320.229,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		79.053.409.467,15	89.649.456.895,57
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		28.306.464.549,00	9.078.391.591,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		8.883.984.929,00	6.230.975.412,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		477.108.051.000,00	485.041.973.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		147.020.725.875,00	135.970.798.517,00
Penerimaan Dana Hibah (BOS)		20.523.470.500,00	23.876.770.069,36
Penerimaan Dana Penyesuaian		201.895.208.000,00	194.783.734.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi		29.233.056.629,00	32.432.076.903,00
Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi		90.948.227.681,00	147.511.283.451,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.102.326.495.813,29	1.143.988.633.866,93
Arus Keluar Kas	G.5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		330.744.375.330,96	326.948.283.327,15
Pembayaran Barang dan Jasa		287.037.542.878,20	264.889.574.313,32
Pembayaran Hibah		4.348.806.915,00	4.999.075.260,00
Pembayaran Bantuan Sosial		9.759.390.168,00	4.586.492.864,00
Pembayaran Bagi Hasil kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa		1.482.254.412,00	2.541.808.944,00
Pembayaran Bantuan Keuangan kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa		225.108.095.025,00	242.780.065.375,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		97.227.738,00	254.924.128,00
Pembayaran Tak Terduga		3.930.140.200,00	3.560.981.923,00
Jumlah Arus Keluar Kas		862.507.832.667,16	850.561.206.134,47
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		239.818.663.146,13	293.427.427.732,46
Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset NonKeuangan	G.5.5.1.2		
Arus Masuk Kas	G.5.5.1.3		
Penjualan Aktiva Tetap		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas	G.5.5.1.4		
Perolehan Tanah		0,00	197.678.226,79

Sumber: Data laporan Keuangan kabupaten Nagan Raya

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Yang Berakhir Samapi Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Ref	2021	2020
Ekuitas	G.5.6.1	2.075.887.703.697,43	1.887.683.887.186,83
Surplus/Defisit-LO	G.5.6.2	107.889.080.341,62	175.062.195.341,62
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:	G.5.6.3		
Selisih penilaian aset tetap		(65.067.422,00)	19.371.898.028,56
koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset		15.267.974.663,00	(134.349.984,00)
Koreksi nilai hutang		(628.761.766,21)	1.039.148.416,80
Koreksi penghapusan aset lainnya		(18.015.734.400,00)	(6.769.378.950,00)
Koreksi nilai piutang		2.095.453.734.400,00	(312.229.623,00)
Koreksi nilai aset tetap karena penghapusan aset		(352.423.992,00)	(631.431.821,00)
Koreksi nilai aset tetap karena pelelangan aset		(10.337.642.406,00)	0,00
Koreksi nilai aset tetap karena transfer aset (P3D)		(17.285.740.632,00)	0,00
Koreksi lebih catat beban barang dan jasa		2.710.658,00	195.329.992,62
Koreksi nilai aset tetap karena hibah aset		(16.877.997.771,00)	113.285.043,00
Koreksi penambahan nilai hasil inventarisasi aset tanah		43.603.728.835,00	269.350.066,00
Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan aset lain-lain		1.514.250.000,00	0,00
Koreksi nilai lain-lain		1.869.094.849,79	0,00
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/Kesalahan Mendasar:		789.843.849,79	13.141.621.168,98
Ekuitas Akhir	G.5.6.4	2.184.566.628.296,93	2.075.887.703.697,43

Sumber: Data laporan Keuangan kabupaten Nagan Raya



RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59
Telepon: 0655-7110535

Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Nomor : 1329/UN59.4/LT/2021
Hal : **Izin Penelitian Skripsi**

02 November 2022

Yth.

Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya

di-

Tempat.

Dekan Fakultas Ekonomi dengan ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberi izin kepada:

Nama : Tika Elisa
NIM : 1805906030080
Fakultas : *Ekonomi*
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Desa karang anyar
Judul Penelitian : Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa, guna melengkapi penyusunan skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

Demikian surat ini disampaikan, atas segala perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan I
Bagian Akademik dan Kemahasiswaan,

Dr. Syarif, S.E., M. Si.
NIP. 197506242021211001

Tembusan :
- Peninggal,-

BIODATA PENULIS



Nama : **Tika Elisa**
Tempat / Tanggal Lahir : Karang Anyar, 11 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
Suku : Aceh
Alamat : Desa Karang Anyar – Kec. Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya
No. Hp : 0822-1463-7660
Email : tikaelisa70@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Alm. Harsoyo
Pekerjaan : -
Ibu : Surati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Desa Karang Anyar – Kec. Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya

Pendidikan Formal

1. SD Negeri Sukamulia : Lulus Tahun 2012
2. SMP Negeri 2 Darul Makmur : Lulus Tahun 2015
3. SMK Dharmasalihat : Lulus Tahun 2018